

JURNAL

UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIFKA ANNISA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN



Diajukan oleh :

BONIFATIUS DANI HUSODO

NPM : 110510573

Progam Studi : Ilmu Hukum

**Progam Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengkata Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIFKA ANNISA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN**



Diajukan oleh :

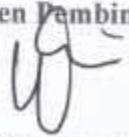
BONIFATIUS DANI HUSODO

NPM : 110510573
Progam Studi : Ilmu Hukum
**Progam Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengkata Hukum**

Telah Disetujui


Dosen Pembimbing

Tanggal : 18 Juni 2015


Dr.G. Widiartana, SH., M. Hum

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**




Endro Susilo, S.H., LL.M.

- I. Judul** : Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan
- II. Nama** : Bonifatius Dani, G. Widiartana
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Humans are social creatures who can not live without another human being. The ability of humans as social beings is given by God Almighty directly to private individuals. In a patriarchal society feel that the man is considered to have more power than women. A woman who had been raped would be traumatized. Rape by juridical construction legislation in Indonesia (the Criminal Code) is the act of forcing a woman who is not his wife to have sex with her with violence or threat of violence. Rape usually occurs due to various causes, namely internal factors (which comes from the victims themselves) and external factors (which comes from outside themselves victims of rape itself). A woman was raped because of physical and psychological conditions are weaker than the perpetrators of rape. The formulation is How attempts Governmental Organization (NGO) Rifka Annisa in providing protection for victims of rape and the barriers are faced by Governmental Organization (NGO) Rifka Annisa in providing protection for victims of rape?. This research is empirical research that focuses on the behavior of public law (law n action) by examining the behavior, state, or opinions in public life. Primary data as the main data obtained from the study at a location on the behavior of the legal community and with secondary data (material law). Non Governmental research results Rifka Annisa in the protection of rape victims is to provide psychological assistance to victims, strengthen victim psychology, reduce the impact of the traumatic experienced by the victim, as litigatif guidance in the completion of legal processes, so that women can fight for rape victims their rights and in providing protection to victims of rape often are barriers, because the police and the attorney often differ in the interpretation of the elements of rape. Victims of rape because of these barriers protection to victims of rape to be blocked.

Keywords: efforts, protection of victims, rape

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Masyarakat patriarki merasa bahwa laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kaum laki-laki merasa bahwa mereka lebih memiliki kuasa yang lebih di bandingkan perempuan. Anggapan tersebut sering menyebabkan kaum laki-laki melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap perempuan. Masyarakat Jawa menganggap kaum perempuan lebih menggunakan perasaan daripada logika dalam memecahkan masalah. Keadaan tersebut membuat kaum perempuan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Angka kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia tergolong tinggi, dan setiap tahun angka kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia meningkat semakin tinggi. Korban tindak pidana pemerkosaan di Indonesia tidak hanya perempuan dewasa ataupun remaja, akan tetapi juga anak-anak.

Idealnya negara melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tanpa kecuali. Ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Huruf D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Idealnya negara melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tanpa kecuali. Ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Huruf D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah positif dalam memberikan upaya positif terhadap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Saat Ini dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan dapat dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan usaha mandiri dari kalangan organisasi swasta yang berciri altruistik, edukatif, agama dan perlindungan alam lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia dalam masa kini dan masa datang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul :

**“UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
RIFKA ANNISA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan ?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law n action*) dengan meneliti perilaku, keadaan, atau pendapat di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan di suatu daerah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh fakta hukum yang pada akhirnya menjadi data primer. Data primer sebagai data utama diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku masyarakat hukum dan disertai data sekunder (bahan hukum).

BAB II : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

A. Tinjauan tentang Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Swadaya Masyarakat adalah merupakan usaha mandiri dari kalangan organisasi swasta yang berciri altruistis, edukatif, agama dan perlindungan alam lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia dalam masa kini dan masa dating. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang

kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya¹.

2. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat

Tujuan LSM dari berbagai jaman adalah sama yaitu mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari masyarakat yang dilayani, tetapi mereka mempunyai motivasi kerja yang berbeda dari zaman ke zaman LSM itu ada Karena masyarakat atau organisasi Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga yang lebih besar lagi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya

B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi macam, sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

¹ LAKSMI.INDONESIA/posts/222356447837950, diakses tanggal 9 Maret 2015, Jam 10.10

Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Pengertian Pemerkosaan dan Korban Pemerkosaan

1. Segi Yuridis Formal

Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana perkosaan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

1. Segi Teologis

Hubungan kelamin itu sendiri dipandang sangat sakral, merupakan karunia yang agung dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari jurang kepunahan. perkosaan dikategorikan sebagai dosa karena dapat mengganggu keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani manusia.

2. Segi Sosiologis

Pelaku perkosaan dianggap sebagai orang yang bejat yang telah melakukan perbuatan tidak pantas dan asusila, melanggar norma hukum dan agama, emosi warga masyarakat seringkali disalurkan secara vulgar dengan menghajar pemerkosaan tersebut sampai babak belur.

3. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan

Perlindungan bagi korban agar tidak menerima ancaman dari pelaku pemerkosaan adalah dengan disediakannya shelter atau rumah

bagi korban, agar tidak mendapatkan ancaman dan tekanan dari pelaku, serta korban pemerkosaan tersebut wajib didampingi oleh Psikiater. Perlindungan tersebut dilakukan setelah korban menjadi korban pemerkosaan hingga jalan proses dipengadilan, selama dipengadilan korban juga wajib didampingi oleh Psikiater dalam memberikan keterangan di pengadilan.

C. Tindakan dan Kendala Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

1. Tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan

Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan dan hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan. Lembaga Rifka dalam memberikan perlindungan korban perkosaan antara lain dengan memberikan pendampingan psikis kepada korban perkosaan, serta menguatkan psikologi korban akibat pemerkosaan, dan melakukan pendampingan secara litigatif di dalam proses-proses penyelesaian hukum dari proses pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) hingga putusan dari hakim kepada pelaku pemerkosaan

2. Tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menekan jumlah angka terjadinya pemerkosaan.

Dalam menekan angka jumlah pemerkosaan, Rifka Annisa melakukan promosi dan pemahaman di kalangan anak muda, memberikan pemahaman mengenai relasi laki-laki dengan perempuan yang baik itu seperti apa, serta mengajarkan kepada laki-laki mengenai cara bertanggung jawab dengan dirinya sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan. Bagi perempuan dengan memberikan pemahaman mengenai cara –cara menjaga dirinya sendiri, karena kekerasan seksual itu terjadi pada usia remaja. Cara lainnya adalah dengan memaksimalkan peran pengasuhan orang tua, karena anak-anak yang kehilangan peran pengasuhan dari orang tua itu memiliki kerentanan mejadi korban kekerasan seksual

3. Hambatan-hambatan dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan

perbedaan konteks hukum mengenai perbedaan pengertian atau penafsiran mengenai pemerkosaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Polisi menafsirkan perkosaan berbeda dengan Jaksa, atau di Kepolisian memahami bahwa kasus yang ditangani adalah bentuk pemerkosaan akan tetapi oleh Kejaksaan memahami kasus yang ditangani tidak memenuhi unsur-unsur tindak pemerkosaan. Kadang-kadang tindak pidana perkosaan yang di yakini terjadi seringkali tidak bisa diproses secara hukum karena adanya perbedaan penafsiran mengenai unsur pemerkosaan oleh Polisi dan Jaksa, berakibat tentang kurangnya alat bukti. Menurut Polisi dikatakan sudah

adanya perkosaan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan menurut Jaksa untuk dapat dikatakan ada perkosaan itu tidak cukup alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, tetapi harus disertai dengan keluarnya sperma.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan korban pemerkosaan adalah dengan memberikan pendampingan secara psikis kepada korban, menguatkan psikologi korban, mengurangi dampak trauma yang dialami oleh korban, melakukan pendampingan secara litigatif didalam proses-proses penyelesaian hukum, sehingga perempuan korban pemerkosaan bisa memperjuangkan hak-haknya.
2. Bahwa dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan sering terdapat hambatan-hambatan, karena Kepolisian dan Kejaksaan sering berbeda didalam penafsiran mengenai unsur-unsur perkosaan. Perbedaan penafsiran mengenai perkosaan tersebut berakibat pada tidak maksimalnya perlindungan oleh Rifka Annisa berupa pendampingan dalam proses litigasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran agar kepolisian dan kejaksaan sama-sama dalam satu

penafsiran mengenai unsur-unsur pemerkosaan, sehingga dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan menjadi lebih maksimal dan pelaku pemerkosaan dapat diberikan sanksi akibat perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aroma Elmina Martha., 2012, *Perempuan dan Kekerasaan Rumah Tangga*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Sanksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode pembuatan kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Utara.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, P.T Refika Aditama, Bandung.
- Maya Indah S, 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Grha Ilmu, Yogyakarta.
- Suryono Ekotama., St. Harum Pudjiarto RS., G. Widiartana, 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website :

Artikelsiana, 2014, pengertian upaya definisi fungsi apa itu, diakses dari

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-upaya-definisi-fungsi-apa-itu.html#> , diakses tanggal 9 Maret 2015.

Yuyantilalata.blogspot, 2012 , pemerkosaan , diakses dari

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemerkosaan.html>, 10
Maret 2015

Kasyfulonline, 2015, upaya pemerintah lsm dan masyarakat,

<http://kasyfulonline.heck.in/upaya-pemerintah-lsm-dan-masyarakat-dala.xhtml>, 9 Maret 2015

LAKSMI.INDONESIA/posts/222356447837950, diakses tanggal 9 Maret 2015, Jam 10.10

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemerkosaan.html> ,diakses tanga;
10 Maret 2015, jam 13.30.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum